



**Perbatasan Indonesia di Masa Pandemi Covid-19:
Studi Kasus Wilayah Perbatasan di Kalimantan dan Papua
Melyana R. Pugu¹, Enny Fathurachmi^{2*}**

¹ Universitas Cendrawasih, Indonesia

² Universitas Mulawarman, Indonesia

* Corresponding author: enny_fathurachmi @unmul.ac.id

Abstract. The Covid-19 Pandemic in Indonesia is vulnerable to spread to various regions. Border areas are quite vulnerable points as entry points for the spread of Covid-19 through human movement. Meanwhile, the policy model for handling and prevention at vulnerable points is not yet optimal. For this reason, this study aims to provide an overview of the condition of the Indonesian border areas related to human security and the policy of the Indonesian government in handling and preventing the spread of Covid-19 in border areas. In addition, it also explains the efforts made by the government and the obstacles and constraints faced. This study took a case study in the East Kalimantan-North Kalimantan and Papua regions. This study uses a qualitative method with data collection techniques through literature studies, interviews and observations. The data from the data mining were analyzed by searching and compiling systematically so that they are easy to understand and the findings can be informed to others. The results found indicate that between East Kalimantan-North Kalimantan government there are provide locally policies that refer to central government. On the other hand, Papua government not provide local policies so that there among province no standard model as a guideline in handling and preventing the Covid-19 Pandemic. They interpret instruction in various ways that have an impact on optimizing results in the field.

Keywords: East Kalimantan, North Kalimantan, Papua, Covid-19, Border

Pendahuluan

Daerah perbatasan negara di Indonesia selama ini banyak menyisahkan cerita tentang persoalan keterisolasian dan ketimpangan pembangunan. Bahkan seringkali dianggap sebagai wilayah pinggiran yang termarjinalkan. Untuk itu paradigma daerah pinggiran coba dirubah dengan menggunakan diksi sebagai “beranda” yang menjadi etalase bagi negara. Pendekatan yang sering dipergunakan untuk memahami persoalan di perbatasan selama ini lebih banyak menggunakan pendekatan keamanan sementara seringkali pendekatan tersebut kurang tepat untuk melihat kompleksitasnya.

Perbatasan merupakan wilayah yang selama ini dipandang sebagai bagian yang terbelakang dan cenderung tidak mendapat perhatian pembangunan dari pemerintah.

Selama ini sejak Indonesia merdeka 1945 hingga masa kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono barulah wilayah perbatasan mulai dipikirkan untuk dibangun sehingga pada masa rezim tersebut barulah wilayah perbatasan mulai di masukan dalam rencana pembangunan walaupun dalam kenyatannya sebagian besar wilayah perbatasan masih jauh dari pembangunan. Dimasa Rezim Joko Widodo dan Yusuf Kalla mulai terprogram pembangunan wilayah perbatasan yang tergambar dalam program Nawa Cita di point ketiga terkait pembangunan mulai dari wilayah pinggiran.

Kondisi Pandemic Covid-19 semakin menambah kompleksitas persoalan di daerah perbatasan. Mobilitas manusia dan barang di perbatasan yang selama ini menjadi nadi pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat dikarenakan penutupan pintu-pintu keluar masuk, yang terjadi kondisi wilayah perbatasan semakin sulit mengingat akses ke ibukota jauh dan medan yang ditempuh juga sulit untuk mendapatkan logistik sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam penanganan kondisi ini terkesan lambat mengingat jarak selalu menjadi alasan utama dalam penanganannya. Akibatnya masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam mengantisipasi kasus Covid-19 yang terjadi. Kondisi ini tentunya sudah dianggap sebagai ancaman bagi keberlangsungan hidup masyarakat.

Dalam pendekatan keamanan kondisi di perbatasan ini dapat dikategorikan sebagai ancaman keamanan non-tradisional. Dalam bukunya *People, States and Fear*, Barry Buzan menyatakan bahwa keamanan tidak hanya mencakup aspek militer tetapi juga dimensi politik, ekonomi, social dan lingkungan (Buzan, 1991). Dalam konteks ini penyakit menjadi bentuk ancaman dalam keamanan non-tradisional dimana wilayah perbatasan sebagai pintu masuk konektifitas manusia menjadi media yang dapat memperluas penyebaran virus Covid-19. Penelitian ini akan menjelaskan gambaran kondisi perbatasan Kalimantan Timur – Kalimantan Utara dan Papua, pandemi covid-19 di kedua perbatasan tersebut, kebijakan yang diambil pemerintah untuk menangani penyebaran covid-19 dan hambatan yang dihadapi.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder dimana data diperoleh dari sumber tidak langsung seperti dokumen, buku-buku, jurnal, berita di media maupun artikel-artikel ilmiah. Data sekunder ini dikumpulkan dari studi kepustakaan baik diperoleh secara langsung maupun melalui platform digital berkenaan dengan tema yang relevan. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif melalui metode interpretasi data. Dalam analisis interpretasi sangat dipengaruhi oleh perspektif peneliti dimana menurut Harry Walcott melalui interpretasi data dapat dikembangkan analisis dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang saling menghubungkan dari temuan-temuan penelitian dengan pengalaman personal, mencari nasehat dari sejawat yang kritis dan mengkontekstualisaikan dalam penelitian

dengan kajian Pustaka dan teori terkait (Bakry, 2016). Dalam konteks penelitian ini data-data sekunder yang diperoleh diinterpretasikan oleh peneliti.

Hasil dan Diskusi

Kondisi Perbatasan di Kalimantan Timur – Kalimantan Utara dan Papua

Indonesia memiliki wilayah perbatasan baik darat maupun laut. Ada 10 negara yang berbatasan laut dengan Indonesia dan 3 negara yang berbatasan darat. Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Negara Malaysia serta Provinsi Papua yang berbatasan dengan Papua New Guine menjadi potret dalam melihat kondisi wilayah perbatasan di Indonesia.

1. Kondisi Geografis Perbatasan Kaltim-Kaltara

Sebelum Kalimantan Utara berdiri menjadi provinsi sendiri dan masih menjadi bagian dari Kalimantan Timur wilayah Kaltim yang berbatasan dengan Malaysia cukup banyak. Namun setelah Kalimantan Utara disetujui sebagai provinsi baru maka wilayah perbatasan dengan Malaysia lebih banyak di Kalimantan Utara. Dalam rapat paripurna DPR pada 12 Oktober 2012 maka Kalimantan Utara resmi menjadi provinsi ke-34 dari Indonesia pada 22 April 2013. Kaltara sendiri memiliki 4 Kabupaten meliputi; Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung dengan satu kota administratif yaitu Tarakan. Dari 4 kabupaten di Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia ada 17 Kecamatan. Namun yang paling rawan adalah 5 Kecamatan di Pulau Sebatik, Kecamatan Seimanggaris, Kecamatan Lumbis Pansiangan dan Kecamatan Lumbis Hulu (Rery, 2024).

Sementara itu Kalimantan Timur sendiri dari 7 Kabupaten dan 3 kota yaitu; Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu. Sedangkan 3 kota lainnya terdiri dari; Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang. Di wilayah Kaltim tinggal dua Kecamatan yang berbatasan dengan Malaysia yaitu Long Apari dan Long Pahangai di Kabupaten Mahakam Ulu yang berbatasan langsung tepatnya Serawak.

Untuk perbatasan di Kaltara yang berbatasan dengan Sabah memiliki panjang 1.039 kilometer yang terbentang dari Kabupaten Nunukan hingga Malinau dengan jumlah patok sebanyak 12.502 terdiri dari Nunukan tipe A sebanyak 4 patok, tipe B sebanyak 138 patok dan tipe D sebanyak 6539 patok. Sementara untuk di Kabupaten Malinau sampai dengan Kabupaten Mahakam Ulu terdapat 5.653 patok dengan rincian tipe B sebanyak 23 patok, tipe C 82 patok dan tipe D 5.533 patok (kaltara.bpk.go.id, 2022). Saat ini baru ada 3 Pos Lintas Batas Negara yang telah dibangun di wilayah Kaltara meliputi PLBN Sei Nyamuk di Pulau Sebatik, PLBN Labang di Kabupaten Nunukan dan PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau. Ketiga PLBN ini relatif baru karena diresmikan pada 2

Oktober 2024 dan diantara ketiga PLBN tersebut baru PLBN Sei Nyamuk di Pulau Sebatik yang relatif paling siap beroperasi dengan segala fasilitasnya berupa pelayanan dengan unsur *Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS)*. Sementara itu untuk perbatasan di Kaltim yaitu Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu keberadaan PLBN masih bersifat tradisional (Arfan, 2024).

2. Kondisi Geografis Perbatasan Papua

Provinsi Papua secara geografis berbatasan dengan negara Papua Nugini baik perbatasan darat maupun perbatasan Laut, dimana terdapat 5 Kabupaten/kota yang berbatasan dengan Papua Nugini yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Boven Digul. Sedangkan ada 1 Kabupaten yang berbatasan laut dengan Negara Palau yaitu Kabupaten Supiori.

Secara geografis perbatasan Papua dengan Papua New Guinea terbagi berdasarkan batas alam yaitu sungai, laut dan hutan belantara dan juga batas buatan atau *artificial boundaries* antara lain patok batas, tugu batas dan garis batas yang diatur dalam perjanjian perbatasan dua negara sejak awal mula kerja sama RI-PNG tahun 1981 hingga saat ini. Secara umum masalah perbatasan atau demarkasi dan delimitasi antara RI-PNG sudah selesai dirundingkan oleh dua negara.

Perbatasan Papua adalah perbatasan Tipe B dan C yaitu perbatasan dengan pintu batas yang dijaga oleh aparat keamanan secara ketat, ada petugas imigrasi, ada petugas karantina, ada petugas bea cukai; dan ada tipe pintu perbatasan yang hanya dijaga petugas keamanan/TNI tanpa pos. Pos Lintas Batas Nasional (PLBN) Skouw adalah satu-satunya perbatasan Tipe A yang sudah dilengkapi pos pemeriksaan resmi, dan dilengkapi petugas *Custom, Immigration, Quarantine and Security (CIOS)* dan perlengkapan alat deteksi pelintas yang baik walaupun aktivitas ekonomi pelintasan kendaraan oleh dua negara belum dilakukan seperti di PLBN Entikong Kalimantan Barat ataupun PLBN lainnya.

3. Masyarakat Perbatasan Kaltim-Kaltara

Selama ini masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang ada Kaltim dan Kaltara secara ekonomi banyak tergantung pada produk Malaysia dalam penyediaan kebutuhan pangan masyarakat seperti sembako yang 95% pasokannya didapat dari Malaysia (Chandra, 2019). Hal ini dikarenakan akses untuk mendapatkan kebutuhan tersebut lebih mudah dari Malaysia daripada dari Indonesia. Selain itu di wilayah perbatasan ini cukup fleksibel dengan menerima alat tukar pembayaran dengan Rupiah Indonesia maupun Ringgit Malaysia. Harga-harga yang ditawarkan dari produk Malaysia juga lebih murah dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia di perbatasan.

Di Kaltara kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan Malaysia lebih banyak terlihat di Pulau Sebatik bahkan lebih berkembang dan dinamis daripada daerah lain. Hal ini didorong oleh kedekatan secara geografis terutama wilayah Tawau. Selain itu ada ketergantungan ekonomi yang kuat dengan Malaysia berkenaan dengan perdagangan barang, jasa maupun tenaga kerja. Sebagian besar masyarakat di wilayah perbatasan Kaltara adalah suku Tidung namun suku Bugis cukup banyak di Pulau Sebatik. Hal berbeda dengan suku di perbatasan Kaltim yaitu daerah Long Apari yang sebagian besar adalah Dayak Lundayeh.

Mata pencaharian masyarakat di wilayah perbatasan ini sebagian besar adalah bersumber dari pertanian dan hasil kelautan serta berdagang. Untuk wilayah perbatasan di Kaltara komoditi yang dihasilkan relatif lebih luas seperti kelapa sawit, hasil hutan, dan hasil tangkapan laut seperti udang, kepiting dan rumput laut. Bahkan di Pulau Sebatik pertanian pisang juga menjadi andalan bagi masyarakat setempat. Sedikit berbeda dengan masyarakat di perbatasan Kaltim yang bermata pencaharian juga mengandalkan pertanian namun dengan jangkauan yang lebih terbatas dan komoditi dasar seperti padi, jagung dan umbi-umbian. Meskipun ada hasil tangkapan ikan namun skalanya kecil.



Gambar 1. Patok Perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik

Sumber: Herdiansyah, 2024.

4. Masyarakat Perbatasan Papua

Masyarakat perbatasan Papua yang ada di lima Kabupaten baik di Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Boven Digul adalah entitas orang asli Papua dari kabupaten tersebut. Masyarakat di 5 wilayah kabupaten perbatasan ini dapat dikatakan selama ini jauh dari pembangunan. Masyarakat perbatasan kota Jayapura di wilayah perbatasan Skouw-Wutung PNG dimana saat ini terbangun PLBN Skouw pada tahun 2017 lalu adalah masyarakat suku Skouw Mabo, Skouw Sae dan Skouw Yambe juga warga Mosso. Masyarakat asli di wilayah perbatasan ini berdasarkan hasil pengamatan sehari-hari bekerja sebagai petani dan nelayan dengan penghasilan seadanya. Masyarakat di kampung-kampung ini tersusun di pinggir laut lepas Pasifik dengan memiliki pemandangan pantai yang indah.

Kondisi masyarakat di wilayah ini juga ikut merasakan masa Pandemi Covid-19. Aktivitas masyarakat tidak bisa dilakukan dengan normal akibat ditutupnya pintu perbatasan RI-PNG di PLBN Skouw. Masyarakat di kampung-kampung ini berkeluarga dengan masyarakat yang ada di Vanimo PNG. Aktivitas lintas batas yang dilakukan secara tradisional masa Pandemi ini juga tidak seperti biasanya dapat dilakukan. Banyak masyarakat di kampung-kampung ini yang memiliki kebun diwilayah Vanimo dan sebaliknya masyarakat Vanimo juga memiliki kebun diwilayah Skouw.



Gambar 2. Pos Lintas Batas Nasional PLBN Skouw

Sumber: Margianto, 2017



Gambar 3. Pos Lintas Batas Nasional PLBN Skouw

Sumber: Saputra, 2019.

Selain masyarakat perbatasan Skouw Jayapura yang berbatasan dengan Papua New Guinea, juga terdapat masyarakat perbatasan di Kabupaten Keerom yang berbatasan dengan Papua New Guinea yang tersebar di 5 distrik di Kabupaten Keerom antara lain Distrik Arso Timur, Distrik Waris, Distrik Web, Distrik Yaffi dan Distrik Towe. Keadaan masyarakat di 5 Distrik ini juga sangat jauh dari pembangunan termasuk sarana prasarana publik. Keseharian masyarakat adalah petani, berburu, dan pekerja buruh kelapa sawit.

Masyarakat perbatasan Kabupaten Merauke dapat terwakili oleh masyarakat di wilayah perbatasan Sota yang berbatasan dengan Papua New Guinea. Di kabupaten ini telah

dibangun PLBN Sota yang telah terselesaikan pembangunannya tahun 2020 lalu. Di wilayah perbatasan ini terdapat obyek wisata sarang semut yang cukup terkenal dikalangan masyarakat karena bentuknya yang unik. Jarak antara kota Merauke ke perbatasan Sota sekitar 2 jam.

Masyarakat perbatasan Sota adalah suku Marind Anim. Suku ini mendiami Papua di sisi selatan. Tepatnya, mulai dari Selat Muli (Selat Mariane) hingga di perbatasan Papua dan Papua Nugini. masyarakat banyak mendiami aliran Sungai Buraka, Bian, Eli, Kumbe, dan Maro. Secara administrasi masuk zona Distrik Okaba, Merauke, Kimam, dan Muting. Secara harfiah, kata Anim diadopsi dari anem yang berarti laki-laki. Untuk penyebutan wanita adalah anum. Sebagai suku besar, Marind Anim juga terdiri dari sub-suku. Sebut saja Kanum-Anim, Yei-Anim, Yab-Anim, Maklew-Anim, dan Kukari-Anim. Khusus Kukari-Anim, suku ini mendiami zona geografis PNG. Kesamaan sub-suku itu yang menguatkan ikatan antara Merauke dengan Papua Nugini. Papua dan PNG dipisahkan oleh hukum negara. Namun, secara budaya masyarakat dua negara sangatlah dekat alias bersaudara. Secara ekonomi, Merauke dan Papua Nugini juga memiliki kedekatan. Aktivitas bisnis yang melibatkan warga dari 2 negara ini sangat kuat. Budaya barter juga masih berlaku di sana. Suku Marind Anim ini mengandalkan produksi pertaniannya. Suku ini mengolahnya dari berladang. Komoditinya ada ubi jalar, ubi kayu, kava, hingga sagu. Aktivitas lainnya menangkap ikan dan berburu (Ramdhani, 2019).



Gambar 4. Pos Lintas Batas Nasional PLBN Sota Merauke

Sumber: Prasetyo, 2021.

Gambar Empat (4) kabupaten lainnya baik Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang dan kabupaten Boven digul adalah kabupaten yang juga memiliki perbatasan dengan Papua New Guinea yang mana keadaan masyarakat perbatasannya dapat dikatakan tidak berbeda jauh dengan 2 kabupaten perbatasan yang telah penulis uraikan diatas.

Pandemi Covid-19 di Perbatasan Kalimantan Timur-Kalimantan Utara dan Papua

Wilayah perbatasan yang menjadi pintu pergerakan keluar masuk aktifitas manusia dan barang menjadi tempat yang memiliki potensi paling besar dalam penyebaran Covid-19. Berikut gambaran kondisi pandemic yang terjadi di wilayah perbatasan.

1. Pandemi Covid di Perbatasan Kalimantan Timur-Kalimantan Utara dan Papua
Aktifitas masyarakat di wilayah perbatasan yang selama ini berinteraksi intens ke wilayah Malaysia dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi terganggu ketika terjadi Pandemi Covid-19 terlebih ketika pemerintah Malaysia melakukan *lockdown*. Aktivitas masyarakat perbatasan yang selama ini berbelanja maupun mengambil barang ke Malaysia menjadi terhenti dikarenakan Pemerintah Malaysia membatasi interaksi manusia mengingat Malaysia termasuk negara dengan kasus Covid-19 yang tinggi di Asia Tenggara. Bahkan pada Mei 2021 tercatat kematian Covid hampir 2800 kasus padahal jumlah penduduknya 32 juta jiwa (theconversation.com, 2021). Akibatnya adalah masyarakat perbatasan yang ada di Kaltim maupun Kaltara harus mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk berbelanja kebutuhan pangan ditempat lain yang jarak tempuhnya lebih jauh dan hanganya lebih mahal.

Tidak hanya Malaysia yang mengalami kasus Covid-19, Kaltara juga mengalami kejadian yang sama. Pada data awal 2022 untuk wilayah Provinsi Kaltara angka kematian akibat Corona yaitu sebanyak 816 orang. Kasusnya tersebar di Tarakan 356 orang, di Bulungan 204 orang, di Nunukan 137 orang, di Malinau 93 orang dan di Tana Tidung 26 orang. Sejak adanya kasus pertama di Kaltara pada 27 Maret 2020 lalu, total akumulasi positif Covid-19 di Kaltara sebanyak 35.920 kasus. Namun angka kesembuhan juga cukup tinggi, yaitu sebanyak 35.082 orang (Mufid, 2022).

Untuk di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan data yang dihimpun oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kaltim, per 31 Januari 2022, jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 mencapai 38 kasus, dirawat 26 kasus, sembuh 12 kasus dan tidak ada kasus meninggal dunia (Sya'rawie, 2022). Melansir data dari kemkes.go.id, jumlah kasus positif virus Corona di Kabupaten Mahakam Ulu telah mencapai 1.594 orang. Kemudian yang meninggal akibat COVID-19 sebanyak 27 orang serta 1.567 orang dinyatakan sembuh. Hingga 21 Juni 2022, Mahakam Ulu tercatat memiliki 1.822 kasus Covid-19 yang artinya ada 1,35% penduduk Mahakam Ulu terjangkit Covid-19. Jumlah tersebut dapat dikatakan yang paling kecil di Kaltim (Sucipto, et al, 2022).

Untuk provinsi Kalimantan Utara wilayah yang paling banyak mendapatkan kasus Covid-19 adalah Kabupaten Nunukan yang merupakan wilayah perbatasan. Sebagai konsekuensi Kabupaten Nunukan yang menjadi pintu keluar masuk aktifitas manusia sehingga mengakibatkan lonjakan kasus Covid-19 jika dibandingkan dengan kabupaten lain di provinsi Kaltara. Kondisi ini berbanding terbalik dengan yang dialami oleh

Kabupaten Mahakam Ulu yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dimana menjadi kabupaten paling sedikit mendapatkan kasus Pandemi Covid-19. Kondisi ini disebabkan wilayah Mahakam Ulu yang memiliki satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia yaitu Long Apari secara geografis letaknya jauh dari pusat Ibukota Provinsi dan medan tempuh yang sulit.



Gambar 5. Peninjauan Pos Long Apari

Sumber: Zakaria, 2024.

2. Pandemi Covid-19 di Perbatasan Papua

Covid-19 yang terjadi diseluruh dunia sejak akhir desember 2019 di Wuhan China dan tiba di Indonesia awal Januari 2020 menjadi catatan kelam kehidupan umat manusia didunia termasuk masyarakat perbatasan di Papua. Perbatasan Papua dengan Papua New Guinea telah memberlakukan penutupan pintu gerbang perbatasan dua negara sejak Januari bagi Papua New Guinea dan Februari bagi perbatasan Papua. Jumlah kasus covid-19 di perbatasan Papua dapat terlihat dalam table berikut:

Tabel 1. Jumlah Penderita Covid-19 di 6 Kab/Kota Perbatasan Papua

No	Kota/Kabupaten	Positip	Dirawat	Sembuh	Meninggal
1	Kota Jayapura	8.807	670	7.985	152
2	Kab.Keerom	268	52	208	8
3	Kab. Peg.Bintang	11	2	9	0
4	Kab. Merauke	817	40	728	49
5	Kab. Boven Digul	290	1	286	3
6	Kab. Supiori	76	0	76	0

Sumber: papua.go.id, n.d.

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah kasus Covid-19 di wilayah yang berbatasan dengan Papua New Guinea cukup tinggi antara lain Kota Jayapura, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Merauke disusul oleh tiga Kabupaten lainnya.

Berbeda dengan negara tetangga Papua New Guinea yang jumlah kasus Covid-19 dapat dikatakan tidak terlalu tinggi untuk ukuran dua negara antara lain berdasarkan hitungan *Worldmeters* terlihat bahwa pada tanggal 15 April 2021 kasus Covid -19 di Indonesia

tercatat 1,599,763 dan Papua New Guinea 9,343 kasus. Sungguh perbedaan jumlah yang sangat besar. Indonesia masuk dalam peringkat ke 19 sedangkan Papua New Guinea ada di peringkat 153 dunia kasus Covid-19 (worldometers.info, n.d.) .

Dapat dikatakan bahwa pandemi covid-19 juga dirasakan oleh masyarakat perbatasan di Papua antara lain pintu-pintu gerbang perbatasan ditutup dan penjagaan pelintas batas tradisional juga ditutup. Keadaan Perbatasan Papua masa Pandemi Covid-19 terasa dengan ditutupnya pintu perbatasan Papua antara lain Pos Lintas Batas Nasional Skouw pada bulan Februari 2020. Sementara negara Papua Nugini yang berbatasan dengan Papua telah terlebih dahulu menutup wilayah perbatasan negara tersebut per 30 Januari 2020 (Pugu & Yani, 2020).

Ditutupnya perbatasan Papua adalah sesuai dengan petunjuk pemerintah sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan terkait penyebaran virus Covid-19 melalui batas negara. Dengan ditutupnya pintu perbatasan maka aktivitas pasar perbatasan di PLBN Skouw maupun pintu perbatasan lainnya di Kabupaten Merauke, Keerom, Pegunungan Bintang, Boven Digul menjadi terhenti. Aktivitas sosial ekonomi masyarakat perbatasan Papua mengalami kendala karena kegiatan bercocok tanam atau ke kebun, berburu dan jual-beli di pasar perbatasan menjadi tertutup dan mengganggu kehidupan masyarakat perbatasan Papua. Bahkan aktivitas adat seperti pernikahan atau mengunjungi keluarga yang meninggal pun tidak dapat dilakukan oleh masyarakat perbatasan Papua ke Papua New Guinea ataupun sebaliknya.

Dapat dikatakan bahwa pengamanan perbatasan diperketat dengan ditutupnya pintu-pintu gerbang perbatasan Papua – Papua New Guinea yang mengganggu aktivitas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang sama-sama memiliki ras Melanesia dan bersaudara dan dipisahkan oleh batas negara. Keterbatasan masyarakat perbatasan yang masih jauh dari sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan perumahan yang layak menjadikan kehidupan masyarakat menjadi lebih terasa berat. Diperlukan perhatian dan penanganan dengan melihat kasus-kasus Covid yang terjadi di wilayah perbatasan.

Kebijakan Penanganan dan Pencegahan oleh Pemerintah

Terjadinya kasus Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah khususnya yang ada di daerah mengingat kondisi ini dikategorikan menjadi kejadian luar biasa yang tentunya belum pernah dihadapi oleh pemerintah daerah sebelumnya. Diperlukan penanganan yang optimal untuk mencapai target-target penyelesaian kasus yang terjadi.

1. Kebijakan Pemerintah Kaltim-Kaltara

Ketika terjadi kasus Covid-19, pemerintah Kaltara melalui Gubernur membentuk Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 yang melibatkan berbagai unsur seperti perangkat daerah, Hal

ini sebagai tindak lanjut instruksi Mendagri Tito Karnavian yang juga telah menerbitkan SE tertanggal 29 Maret 2020 No. 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah (Suratman, 2020). Dinas Kesehatan, Korem, Kodim. Polda dan juga Lanud. Berbagai unsur masyarakat ini diinstruksikan untuk melakukan tindakan preventif sebagai bentuk pencegahan dan juga penanganan jika terlanjur terjadi kasus.

Sebagai langkah preventif pemerintah Kaltara menjaga ketat jalur keluar masuk baik perbatasan antar daerah maupun wilayah perbatasan dengan Malaysia namun untuk jalur C masih longgar. Jalur C merupakan jalur alternatif yang bukan merupakan akses utama seringkali menjadi jalur pintas dalam interaksi memasuki wilayah sehingga seringkali jalur-jalur semacam ini yang justru memiliki resiko tinggi dalam penyebaran Covid-19. Berbanding terbalik dengan yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia yang melakukan kebijakan *lockdown* dan menutup ketat jalur keluar masuk.

Pelaksanaan pencegahan dan penanganan yang dilakkan Pemerintah Kaltara juga mengacu pada arahan Gubernur Kaltara Ir. Irianto Lambrie yang berisi 7 poin (Suratman, 2020), yaitu:

- (1) Pentingnya dilakukan upaya penjejak riwayat perjalanan pasien positif COVID-19 oleh gugus tugas penanganan COVID-19 di daerah. Utamanya, terhadap keluarga, tetangga, kolega kerja, dan tempat lain yang biasa dikunjungi.
- (2) Perubahan pola kerja gugus tugas penanganan COVID-19 di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
- (3) Dukungan anggaran penanganan COVID-19 di Kaltara. Pemprov Kaltara menyiapkan realokasi anggaran sekitar Rp 39 miliar.
- (4) Setiap bupati/walikota di Kaltara untuk tidak mengeluarkan kebijakan karantina wilayah atau isolasi terbatas secara sepihak. Jika harus dilakukan, penetapan karantina atau isolasi harus mengikuti prosedur yang ada.
- (5) Penanganan tenaga kerja migran/TKI. Sesuai dengan usulan Bupati Nunukan kepada Gubernur Kaltara diputuskan bahwa pintu masuk pemulangan TKI di Kaltara, diputuskan melalui satu pintu di Nunukan.
- (6) Pembudayaan kebiasaan mencuci tangan dengan benar.
- (7) Dukungan atas upaya antisipasi penyebaran virus corona di masyarakat. Sesuai dengan instruksi Gubernur diinstruksikan agar setiap ASN di lingkup Pemprov Kaltara untuk menyisihkan pendapatannya senilai Rp 100 ribu per orang untuk membantu upaya mandiri masyarakat membatasi penyebaran virus corona di lingkungan masing-masing.

Secara teknis di daerah perbatasan Kabupaten Nunukan untuk penjagaan TKI yang keluar masuk dari kabupaten ini diperiksa menggunakan prosedur standar dengan *Thermal Scanner* dan pengecekan suhu tubuh bahkan petugas juga melakukan hal yang sama.

Sementara itu di Kabupaten Malinau yang juga merupakan wilayah perbatasan, pemerintah setempat mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malinau Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Secara teknis diimplementasikan melalui tindakan pengecekan kondisi kesehatan pada mobilitas masyarakat dengan pemeriksaan sesuai dengan prosedur WHO dan mempersiapkan penambahan kamar-kamar isolasi di Rumah Sakit Daerah untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.

Pemerintah Kalimantan Timur dalam upaya penanganan Covid-19 dikuatkan dengan penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Provinsi Kalimantan Timur sempat menjadi daerah dengan lonjakan kasus tertinggi kelima di Indonesia pada tahun 2021. Berikut daftarnya:

Tabel. 2 Daftar Provinsi di Indonesia Dengan Kasus Covid-19 (Tahun 2021)

No	Provinsi	Positif	Meninggal
1	DKI Jakarta	845.237 Orang	13.201 Orang
2	Jawa Barat	669.103 Orang	12.540 Orang
3	Jawa Tengah	462.178 Orang	27.777 Orang
4	Jawa Timur	372.388 Orang	26.862 Orang
5	Kalimantan Timur	145.711 Orang	4.846 Orang
6	DI Yogyakarta	144.608 Orang	4.607 Orang
7	Banten	126.907 Orang	2.567 Orang

Sumber: Noor, 2021

Dengan kondisi demikian, pemerintah Kalimantan Timur secara teknis melakukan tindakan untuk membatasi pergerakan dan aktifitas manusia di ruang publik dengan melakukan penutupan pasar dan Mall pada hari Sabtu dan Minggu. Gubernur Kaltim pada saat itu Isran Noor juga menginstruksikan kepada ASN bahwa dilingkungan Pemprov. Kaltim hanya boleh melakukan kerja dikantor sebanyak 1/5 dari jumlah pegawai keseluruhan. Hal ini dimaksudkan agar tidak banyak terjadi interaksi langsung dan sebagian besar melakukan *work from home*.

Secara teknis Pergub Kalimantan Timur diterjemahkan melalui tindakan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui intruksi untuk melakukan pengawasan terhadap pergerakan manusia yang keluar masuk wilayah Mahulu. Bagi warga ber KTP Mahulu yang ingin masuk wajib melakukan Rapid Tes. Sebagai tindakan pencegahan Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh meminta warga mendukung upaya pencegahan Covid-19 dengan menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona melalui *physical distancing* (menjaga jarak fisik), pola hidup sehat, dan lainnya.

2. Kebijakan Pemerintah Papua

Pemerintah daerah Provinsi Papua telah membentuk Satgas Covid-19 yang bertugas memantau, melaksanakan perlindungan dan pencegahan penyebaran virus Covid-19 dengan cara koordinasi antara pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota di Papua dan sinergitas dinas Kesehatan antara provinsi kabupaten kota di Papua. Perbatasan Papua di Skouw ditutup per bulan Februari 2020 dan hingga kini belum di buka secara resmi.

Pada masa awal terjadinya pandemic, akses masyarakat di area publik dibatasi mulai jam 6 pagi hingga jam 2 siang dan pemerintah provinsi Papua memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah Papua juga menutup akses masuk keluar wilayah Papua per 26 Maret 2020. Saat ini aktivitas masyarakat sudah mulai normal dengan penerapan ketat 3M memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Peraturan Menkumham No. 11 tahun 2020 berlaku 2 April 2020 tentang pelarangan sementara orang asing masuk ke wilayah Indonesia juga berlaku di wilayah perbatasan Papua – Papua New Guinea yang mengakibatkan ditutupnya pintu-pintu gerbang perbatasan bahkan pelintasan tradisional.

Berdasarkan pengamatan penulis, perbatasan Skouw-Wutung memang di tutup dan tidak ada aktivitas ekonomi dan social masyarakat perbatasan, namun tidak ada peraturan yang khusus bagi masyarakat perbatasan Papua di masa pandemic covid-19 yang dituangkan dalam peraturan daerah yang jelas. Pemerintah Provinsi Papua juga belum mengeluarkan perda pencegahan virus covid-19 yang telah dibahas sejak Agustus 2020 lalu.

Keadaan masyarakat perbatasan Papua masa pandemic covid-19 tidak berbeda dengan keadaan sebelum covid, karena masyarakat belum menerima vaksin, tidak menerima bantuan masker dan bantuan social ekonomi lainnya. Sejauh data yang didapat masker dibagikan di Merauke Sota oleh aparat TNI perbatasan, sementara di Arso Kabupaten Keerom, Masker dibagikan Polri kepada masyarakat.

Hambatan dan Kendala Penerapan Kebijakan

Perbatasan Kaltim dan Kaltara serta Papua adalah perbatasan yang letaknya cukup jauh dari ibukota Provinsi maupun ibukota Kabupaten dimana perbatasan itu berada, dengan kondisi pandemi Covid-19 ini maka hambatan yang dialami oleh pemerintah kabupaten kota adalah terbatasnya Fasilitas kesehatan baik rumah sakit, puskesmas maupun puskesmas pembantu. Pun juga terbatasnya tenaga medis dan non medis yang dapat menjangkau wilayah-wilayah atau kampung-kampung perbatasan.

Di perbatasan Papua sangat minim tenaga dokter bahkan ada kampung-kampung yang tidak memiliki dokter akibat kurang adanya sarana prasarana pendukung seperti rumah yang layak bagi dokter mengakibatkan minimnya jumlah petugas medis ini di kampung-

kampung perbatasan Papua. Dimasa pandemi covid-19 ini tentu saja masyarakat perbatasan Papua sangat kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Bahkan mungkin vaksin belum diterima oleh masyarakat dikampung-kampung perbatasan. Hal sama juga menjadi kendala bagi pemerintah di Kabupaten wilayah perbatasan di Kaltim dan Kaltara yang mengeluhkan terbatasnya fasilitas kesehatan. Namun demikian dengan kondisi yang jauh dari ibukota justru sempat membuat satu Kecamatan di Mahakam Ulu yaitu Long Apari bersih dari kasus Covid-19.

Kendala yang dihadapi oleh pemerintah adalah dengan medan yang jauh dan berat maka kampung-kampung perbatasan Kaltim-Kaltara dan Papua jauh dari puskesmas atau rumah sakit sehingga sosialisasi yang dilakukan terkait protap kesehatan menjadi kurang dilakukan dan masyarakat menjadi tidak tahu dampak covid-19 yang berbahaya. Banyak masyarakat yang tidak memakai masker bahkan aktivitas dilakukan sehari-hari seperti biasanya. Ini adalah kendala yang didapatkan pemerintah tetapi juga membahayakan masyarakat perbatasan itu sendiri. Masyarakat bahkan banyak yang tidak percaya dengan penyakit ini akibat kurangnya sosialisasi dari pemerintah kabupaten/kota.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan beberapa hal berkenaan dengan geografis, interaksi social, kondisi masyarakat saat Pandemi Covid-19, kebijakan yang diambil dalam penanganannya serta hambatan yang dihadapi. Wilayah perbatasan di Kaltim-Kaltara dan Papua sama-sama berhadapan dengan kondisi dan medan sulit dalam distribusi logistik dari pusat pemerintahan daerah. Namun demikian masyarakat diketiga wilayah perbatasan tersebut sama-sama memiliki kedekatan kekerabatan dengan masyarakat perbatasan negara tetangganya.

Saat Pandemi Covid-19 ketiga daerah perbatasan Kaltim-Kaltara dan Papua mengalami penutupan pintu-pintu gerbang perbatasan Di Kabupaten Nunukan dengan pintu masuk di Sei Nyamuk Pulau Sebatik, di Kabupaten Malinau dipintu masuk Long Nawang dan PLBN Skouw Kota Jayapura dan PLBN Sota Merauke serta pos-pos lintas batas tipe B dan C yang ada di kabupaten Keerom, Kab.Peg.Bintang dan Kabupaten Boven Digul. Dengan penutupan itu masyarakat mendapatkan dampaknya yaitu terganggunya aktivitas ekonomi, sosial dan budaya karena tidak dapat melintasi perbatasan. Kebijakan yang diambil pemerintah di wilayah perbatasan Kaltim dan Kaltara lebih menekankan pada kebijakan yang mengacu pada intruksi pemerintah pusat yang dituangkan dalam kebijakan pemerintah daerah.

Di lain pihak, kebijakan yang diambil pemerintah daerah perbatasan di Papua tidak dibarengi dengan pembuatan kebijakan daerah dan lebih menekankan pada koordinasi internal. Hambatan yang dihadapi dengan kebijakan yang dibuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Papua adalah Pemerintah Daerah

menterjemahkan aturan yang dibuat Pemerintah Pusat sementara Pemerintah Kabupaten menterjemahkan aturan Pemerintah Provinsi secara tersendiri. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan teknis yang dikeluarkan sehingga menimbulkan kebingungan dan dalam hal ini masyarakat perbatasanlah yang paling rentan mendapatkan ancaman dari kondisi Pandemi Covid-19.

Referensi

- Arfan, Muh. (2024, 2 Oktober). Presiden Jokowi turut meresmikan tiga PLBN di Kaltara. *Antara*. <https://www.antaranews.com/berita/4371339/presiden-jokowi-turut-meresmikan-tiga-plbn-di-kaltara#:~:text=batas%20negara%2C%20dan%20ini%20juga%20usaha%20kita,PLBN%20Long%20Nawang%20di%20Kecamatan%20Kayan%20Hulu>
- Asrin. (2022, 27 Januari). Kaltara Miliki 12.502 Patok Perbatasan. *BPK RI*. <https://kaltara.bpk.go.id/kaltara-miliki-12-502-patok-perbatasan/>
- Bakry, U.S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Buzan, Barry. (1991). *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. London: Harvester Wheatsheaf.
- Candra, A.A. (2019, 17 Desember). Warga RI di Perbatasan Gantungkan Pasokan Pangan dari Malaysia. *detikfinance*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4826669/warga-ri-di-perbatasan-gantungkan-pasokan-pangan-dari-malaysia>.
- COVID-19 Coronavirus Pandemic. (n.d.) *Worldometer*. <https://www.worldometers.info/coronavirus/>
- Herdiansyah, F. (2024, 17 Mei). Wabup Minta Penetapan Batas Wilayah RI-Malaysia Segera Dituntaskan. <https://rri.co.id/daerah-3t/695901/wabup-minta-penetapan-batas-wilayah-ri-malaysia-segera-dituntaskan>
- Info Grafis Perkembangan Covid-19. n.d. https://papua.go.id/view-detail-berita-7283/undefined?utm_source=chatgpt.com
- Kasus COVID-19 dan kematian di Asia Tenggara meningkat tajam, apa penyebabnya? (2021, 15 Juni). *The Conversation*. <https://theconversation.com/kasus-covid-19-dan-kematian-di-asia-tenggara-meningkat-tajam-apa-penyebabnya-162255#:~:text=Untuk%20parameter%20dan%20kurun%20waktu%20yang%20sama%2C,kematian%20per%20sejuta%20penduduk%20pada%2030%20Mei>
- Margianto, Heru. (2017, 15 November). Inilah Wajah Baru Pos Lintas Batas Negara Skouw di Jayapura Kompas Images. *Kompas.com*. <https://foto.kompas.com/photo/read/2017/11/15/151071494494e/Inilah-Wajah-Baru-Pos-Lintas-Batas-Negara-Skouw-di-Jayapura>.
- Mufid, F.R. (2022, 18 Januari). 2 Kasus Aktif Corona di Kaltara. *BPK RI*. <https://kaltara.bpk.go.id/22-kasus-aktif-corona-di-kaltara/>

- Noor, M.R. (2021, 29 Agustus). Daftar 10 Provinsi Tertinggi Kasus Covid-19, Kalimantan Timur Berada di Peringkat 5. *BanjarmasinPost.co.id*. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/08/29/daftar-10-provinsi-tertinggi-kasus-covid-19-kalimantan-timur-berada-di-peringkat-5?page=2>.
- Prasetyo, W.B. (2021, 3 Oktober). Presiden Akan Resmikan PLBN Sota di Merauke. <https://www.beritasatu.com/nusantara/835967/presiden-akan-resmikan-plbn-sota-di-merauke>
- Pugu, M.R. dan Yani, M. Y. (2020). Perbatasan Papua – Papua Nugini: Dengan atau Tanpa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Vol. X No. 2. <https://doi.org/10.34010/jipsi.v10i2.3988>
- Ramdhani, G. (2019, 2 Juni). Mengenal Marind Anim, Suku Terbesar Merauke di Festival Crossborder Sota 2019. *Liputan* 6. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3982145/mengenal-marind-anim-suku-terbesar-merauke-di-festival-crossborder-sota-2019>.
- Rery, D. (2024, 25 April). Berbatasan Langsung Malaysia, 17 Kecamatan Dinilai Rawan Penyelundupan. *rri.co.id*. <https://rri.co.id/internasional/653453/berbatasan-langsung-malaysia-17-kecamatan-dinilai-rawan-penyelundupan>.
- Saputra, D.A. (2019, 19 Juli). Jaga Aset Negara: Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Gerbang Paling Timur Indonesia. DJKN Kemenkeu. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-papuamaluku/baca-berita/18284/Jaga-Aset-Negara-Pos-Lintas-Batas-Negara-PLBN-Skouw-Gerbang-Paling-Timur-Indonesia.html>
- Sucipto, Tambunan, I. dan Costa, F.M.L. (2022, 28 Juni). Saatnya Berikan Lebih kepada Wilayah Pedalaman. *Kompas.id*. https://www.kompas.id/artikel/saatnya-berikan-lebih-kepada-wilayah-pedalaman?status=sukses_login&login=1745373733587&open_from=header_button&loc=header_button
- Suratman, E. (2020, 31 Maret). Irianto Keluarkan 7 Arah Penanganan COVID-19 di Kaltara. *Antara Kaltara*. <https://kaltara.antaranews.com/berita/465878/irianto-keluarkan-7-arahan-penanganan-covid-19-di-kaltara>
- Sya'rawie, M.M. (2022, 31 Januari). Menutup Januari 2022, 2 Daerah di Kaltim Kini Masuk Zona Merah Covid-19. *Bisnis Indonesia*. <https://kalimantan.bisnis.com/read/20220131/407/1495399/menutup-januari-2022-2-daerah-di-kaltim-kini-masuk-zona-merah-covid-19>.
- Zakaria, I. (2024, 24 Februari). Pengalaman Pertama Menuju Kampung Terjauh di Mahulu; Long Apari. <https://www.prokal.co/kalimantantimur/1774170583/pengalaman-pertama-menuju-kampung-terjauh-di-mahulu-long-apari>